



UNIVERSITAS  
KRISTEN  
MARANATHA

Fakultas  
Psikologi

# PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI COVID-19

---

## TEORI DAN STUDI KASUS DARI EMPAT DAERAH

**Editor:**

Vida Handayani

**PENERBIT**

Fakultas Psikologi

Universitas Kristen Maranatha

Muhammad AS Hikam

Tery Setiawan

Antonius Suhartomo

Sefty Meliana Tamba

Elkana William Hasibuan

Azzizah Mulia Kusumaningrini Kartodirdjo

Syafira Fauzi

Thariq Auliya Arrazaq

---

# Partisipasi Politik di Indonesia pada Era Pandemi Covid-19

## Teori dan Studi Kasus dari Empat Daerah

Muhammad AS Hikam  
Tery Setiawan  
Antonius Suhartomo  
Sefty Meliana Tamba  
Elkana William Hasibuan  
Azzizah Mulia Kusumaningrini Kartodirdjo  
Syafira Fauzi  
Thariq Auliya Arrazaq



UNIVERSITAS  
KRISTEN  
MARANATHA

Fakultas  
Psikologi

Penerbit  
Fakultas Psikologi  
Universitas Kristen Maranatha

---

# Partisipasi Politik di Indonesia pada Era Pandemi Covid-19

## Teori dan Studi Kasus dari Empat Daerah

### Penulis:

Muhammad AS Hikam

Tery Setiawan

Antonius Suhartomo

Sefty Meliana Tamba

Elkana William Hasibuan

Azzizah Mulia Kusumaningrini Kartodirdjo

Syafira Fauzi

Thariq Auliya Arrazaq

### Editor:

Vida Handayani

### Desain Cover:

Salsyabila Dwiputri Djayany

### Tata Letak:

Salsyabila Dwiputri Djayany



UNIVERSITAS  
KRISTEN  
MARANATHA

Fakultas  
Psikologi

### Penerbit

Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha

Jl. Prof.drg. Surya Sumatri, M.P.H. No.65

Bandung, 60164- Jawa Barat,Indonesia

Tel : +62022-2012186/2003450 Ext. 1315

Email : fp@psy.maranatha.edu



**Partisipasi Politik di Indonesia pada Era Pandemi Covid-19: Teori dan Studi Kasus dari Empat Daerah**

**Muhammad AS Hikam, Tery Setiawan, Antonius Suhartomo, Sefty Meliana Tamba, Elkana William Hasibuan, Azzizah Mulia Kusumaningrini Kartodirdjo, Syafira Fauzia dan Thariq Auliya Arrazaq**

## **Kata Pengantar**

Pada hari Senin (21/8/2017) bertempat di Hotel Mercure, Jl. Sabang, Jakpus, saya, menjadi salah satu pembicara dalam sebuah konferensi internasional, "Culture and Democracy: Inclusive & Participatory Democracy for Sustainable Development." Acara ini diselenggarakan oleh Asia Democracy Network (ADN) yang bekerjasama dengan INFID.

Adapun narasumber lain yang terlibat dalam panel yang khusus membicarakan dinamika demokrasi di Indonesia adalah Bagus Takwin (UI), Bambang Harymurti (Tempo), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), Philip Vermonte (CSIS), dan pembahas, Sugeng Bahagijo (INFID), serta moderator Sandra Hamid (Asia Foundation). Paparan yang saya sampaikan berjudul "Whither Consolidated Democracy?: A Challenge of Political Islam in the Post-Reformasi Indonesia." (Kemana Arah Konsolidasi Demokrasi?: Tantangan Islam Politik di Indonesia Pasca-Reformasi).

Dalam paparan ini saya mengemukakan dua proposisi: 1) Konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-reformasi mengalami kemacetan karena kegagalan dalam institusionalisasi politik pada dimensi elektoral politik; dan 2) Muncul dan berkembangnya pengaruh dan kekuatan Islam politik yang menggunakan masyarakat sipil Indonesia (MSI) dan mempengaruhi politik elektoral di Indonesia. Implikasi dari kedua asumsi itu adalah semakin terhambatnya proses konsolidasi demokrasi yang, pada gilirannya, akan terjadinya ancaman terhadap demokrasi, keamanan nasional yang berdampak negatif pada geopolitik regional dan internasional.

Lambatnya konsolidasi demokrasi setelah bergulirnya gerakan reformasi nyaris dua dasawarsa lalu, telah mengakibatkan kemacetan demokratisasi yang ditandai dengan formalisme atau proseduralisme dalam pelaksanaan demokrasi pada ranah politik elektoral. Dampak kemacetan ini adalah kendati Indonesia secara formal termasuk negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (setelah India dan AS), tetapi secara substantif mengalami kemunduran: semakin rendahnya kepercayaan terhadap Parlemen, marak politik transaksional, korupsi berjamaah di DPR/DPRD, menguatnya oligarki dalam perpolitikan, otonomi daerah yang tak kunjung menciptakan kemajuan ekonomi daerah, dan lain-lain.

Sementara itu, fenomena makin menguatnya pengaruh Islam politik di dalam masyarakat merupakan persoalan serius karena memberi peluang terhadap pelemahan demokratisasi serta maraknya politik identitas yang menyuburkan primordialisme, sektarianisme, dan bahkan ancaman radikalisme. Belum lagi pengaruh ideologi transnasional radikal yang bergabung dengan kekuatan anti-demokrasi yang berasal dari dalam negeri,

semakin menambah kesulitan dalam proses konsolidasi demokrasi dan penguatan demokrasi konstitusional di negeri ini.

MSI merupakan ranah yang paling terbuka bagi tumbuh dan berkembangnya elemen-elemen dan kelompok-kelompok Islam politik. Namun tak berarti bahwa pengaruh mereka berhenti di situ, karena mereka juga memiliki akses dan pengaruh terhadap parpol, elit pemerintah, dan lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga-lembaga kuasi-negara). Hanya saja konsolidasi dan mobilisasi kekuatan Islam politik yang sangat nyata dan berpengaruh adalah melalui politik garis massa yang mampu mempengaruhi dan menghalangi proses demokratisasi. Kasus Pilkada DKI 2017 merupakan sebuah indikator bahwa politik massa yang didukung, dimobilisasi, dan dikendalikan oleh kekuatan Islam politik mampu mempengaruhi politik elektoral dan mengalahkan koalisi parpol pendukung pasangan petahana, Gubernur Ahok dan Wagub Djarot.

Kekuatan Islam politik di Indonesia jika makin mengalami radikalisisasi karena hegemoni ideologi radikal transnasional seperti Khilafahisme, jelas akan semakin memperlambat dan bahkan menghentikan konsolidasi demokrasi. Kemungkinan kembalinya rezim otoriter dan prospek terjadinya disintegrasi nasional karena konflik-konflik sektarian bukan hal yang tak mungkin. Demikian juga implikasi terhadap konstelasi keamanan regional, khususnya maraknya konflik-konflik dan kekerasan yang memakai topeng agama (Islam, Buddhisme, Kristen,) di beberapa negara ASEAN seperti Myanmar, Thailand Selatan, Filipina Selatan, Malaysia, dan Indonesia sendiri.

Konsolidasi demokrasi baik pada tataran politik elektoral maupun masyarakat sipil di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Reformasi parpol adalah salah satu keperluan paling mendesak agar institusionalisasi politik pasca-reformasi berjalan dengan baik dan agar perpolitikan nasional terhindar dari letargi dan kemacetan serta pembusukan. Pada tataran masyarakat sipil, perlu gerakan-gerakan nasional memperkuat upaya pembendungan pengaruh ideologi anti-Pancasila dan UUD 1945 serta deradikalisisasi yang lebih efektif, termasuk pada tataran akar rumput.

Keberhasilan konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah sebuah keniscayaan agar amanat reformasi, khususnya tegaknya sistem demokrasi konstitusional, dapat diperkuat dan dilaksanakan secara efektif di Indonesia.

Sehubungan dengan paparan saya tersebut, pembuatan buku ini dimaksudkan untuk mencapai dua tujuan. Pertama, untuk menyampaikan pemantauan empiris mengenai kondisi partisipasi politik, khususnya perilaku menggunakan hak pilih, dalam masyarakat Indonesia di masa Covid-19. Seperti yang diketahui, partisipasi politik sangatlah penting untuk

keberlangsungan sebuah masyarakat. Perilaku ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku elektoral, namun juga dengan hal-hal yang sifatnya mendasar, seperti bergotong royong dalam lingkungan tempat tinggal, menyampaikan pendapat untuk peningkatan sarana dan pra-sarana sebuah kota dan lain-lain. Oleh karena itu, studi mengenai partisipasi politik sangatlah penting guna mengetahui dinamika masyarakat pada saat penelitian sedang dilakukan.

Kedua, buku ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah modul sederhana yang diharapkan menjadi inspirasi sekaligus panduan bagi pengajar di bidang ilmu sosial dan humaniora untuk mengajar topik partisipasi politik. Istilah ini merupakan sebuah konsep yang meliputi beragam jenis perilaku sosial-masyarakat seorang individu. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa dilihat hanya dari satu perspektif namun harus melibatkan pendekatan multidisipliner. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa pendekatan *social network* yang berbasis pada teori matematika dapat digunakan sebagai pendukung untuk menjelaskan fenomena sosial.

Untuk melaksanakan penelitian mengenai partisipasi politik di masa pandemi Covid-19, kami bekerja sama dengan mitra penelitian, yaitu International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Bersama-sama kami berdiskusi mengenai pemahaman partisipasi politik dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Diskusi tersebut dapat dilihat melalui situs: <https://www.youtube.com/watch?v=rpLzQiBuxc>

Berdasarkan diskusi tersebut, kami berhasil memformulasikan kuesioner untuk dijadikan sumber penggalian data pada kelompok sampel penelitian kami. Sebagai penunjang, kami juga telah mempublikasikan dataset dan protokol penelitian yang kami lakukan sebagai dasar buku ini secara bebas dan dapat diakses melalui DOI: 10.6084/m9.figshare.21387378

Pelaksanaan penelitian dan pembuatan buku ini dimungkinkan berkat hibah dari Hibah Riset Keilmuan LPDP (KEP-2/LPDP/LPDP.4/2021).

Muhammad AS Hikam

Tangerang, Desember 2022



**Partisipasi Politik di Indonesia pada Era Pandemi Covid-19: Teori dan Studi Kasus dari Empat Daerah**

**Daftar Isi**

Kata Pengantar .....	5
Daftar Isi .....	9
Bab I Mengapa Topik “Partisipasi Politik”? .....	11
Bab II Pendekatan Partisipasi Politik .....	15
Bab III Scoping Review Penelitian Partisipasi Politik .....	22
Bab IV Penelitian Perilaku Memilih di masa Covid-19 .....	28
Bab V Rancangan Belajar Mata Kuliah Partisipasi Politik .....	31
Bab VI Rangkuman Partisipasi Politik .....	45
Daftar Pustaka .....	50



## **Bab I**

### **Mengapa Topik “Partisipasi Politik”?**

Salah satu pertanyaan sentral mengenai partisipasi politik adalah seberapa tinggi antusias masyarakat dalam partisipasinya di dalam masyarakat. Hal ini biasanya sering dikaitkan dengan perilaku elektoral. Perilaku ini penting karena berkaitan erat dengan kebijakan publik yang akan dibuat. Jika pejabat dipilih hanya oleh sekelompok kecil pemilih, karena partisipasi politik masyarakat yang rendah, maka pejabat terpilih kemungkinan besar hanya mendapatkan masukan dari sekelompok masyarakat yang tidak representatif. Akibatnya, kebijakan yang akan dibuat juga kemungkinan hanya akan menguntungkan kelompok tersebut. Hal ini tentunya dapat berdampak pada kesinambungan hidup khalayak banyak. Begitu pentingnya partisipasi politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menjadikannya sebagai target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Conceição, 2019).

Bagi sebagian orang, politik adalah kerja atau kiprah yang penuh dengan kekotoran karena sarat dengan praktik-praktik hipokrit, fitnah, korupsi, saling menikam dari belakang, dan pengutamaan kepentingan melebihi moralitas. Politik dan politisi sebagai pelakunya juga dianggap paling bertanggung jawab terhadap segala macam konflik, kekacauan, dan kehancuran dalam masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan tatanan dunia. Minimal, politik dianggap sebagai "kejahatan yang niscaya adanya" (*a necessary evil*), karena kenyataannya memang akan tetap ada, baik kita suka atau tidak, di dalam kehidupan manusia.

Pandangan negatif terhadap politik itu tak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Sebab fakta sejarah manusia juga menunjukkan bahwa kiprah politik bisa juga menghasilkan berbagai manfaat yang besar bagi kemanusiaan dalam konteks tertentu. Politik bisa membebaskan manusia dari penindasan rezim-rezim tiran; membuka kesempatan bagi perlindungan hak-hak dasar manusia; mendukung kebijakan-kebijakan publik yang bermanfaat; melahirkan dan mengembangkan para pemimpin dan negarawan; dan membantu mengerem kelompok kepentingan yang serakah dan haus darah, dan sebagainya.

Persoalannya adalah bagaimana kita mereduksi atau makin mengurangi elemen negatif dari kiprah politik dan mengembangkan, memperkuat serta mempertahankan elemen positifnya. Tugas kita adalah melakukan evaluasi terus menerus secara kritis, dan mendorong pelaksanaan politik yang berbasis pada moralitas dan bertujuan membela kepentingan dan kebaikan umum: baik pada level komunitas, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Dengan cara ini, kendati kiprah politik mungkin tak akan bisa sepenuhnya bersih dari

kekotoran dan kecenderungan-kecenderungan negatif, tetapi akan selalu diupayakan untuk tetap berada pada rel yang sesuai dengan keadaban dan tujuan yang positif.

Kehadiran pandemi Covid-19 telah menyebabkan beragam pihak memberikan atensi kepada bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Namun, dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan bermasyarakat masih sangat jarang. Padahal pandemi ini telah banyak membentuk partisipasi sipil dari masyarakat sebagai cara untuk mengatasi krisis secara kolektif. Partisipasi publik dalam politik juga luput dari perhatian. Hal ini penting untuk diteliti dalam memantau kemajuan demokrasi dan menemukan peta partisipasi politik di masa pandemi. Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai penting untuk melakukan investigasi tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap partisipasi politik. Sesuai dengan perkembangan teknologi, partisipasi politik harus dilihat dalam bentuk online (misalnya meneruskan diskusi politik melalui media sosial) maupun offline (misalnya menghadiri rapat umum suatu pergerakan politik).

Sebagai definisi, partisipasi politik mengacu pada kegiatan sukarela yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun dengan mempengaruhi pemilihan orang-orang yang membuat kebijakan (van Deth, 2016). Contoh kegiatan ini termasuk memberikan suara dalam pemilihan, membantu kampanye politik, menyumbangkan uang kepada seorang kandidat atau gerakan, menghubungi pejabat, mengajukan petisi, memprotes, dan bekerja dengan orang lain dalam suatu masalah. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih kaya dan berpendidikan lebih tinggi berpartisipasi pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang kurang beruntung, meskipun hubungan ini lebih lemah di negara-negara di mana partai yang kuat atau organisasi politik lainnya menyediakan sumber daya alternatif.

Partisipasi politik pada umumnya dikaitkan dengan perilaku memilih atau menggunakan hak pilih seseorang dalam pemilihan kepala daerah atau presiden (Barker, 1998). Akan tetapi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, partisipasi politik secara luas dapat muncul dalam beragam perilaku (Gil de Zúñiga, 2012). Oleh karena itu, di Indonesia perilaku ini mencakup keterlibatan publik seperti gotong royong, keterlibatan dalam sistem keamanan keliling (*siskamling*), diskusi politik, unjuk rasa politik, dan sebagainya.

Perilaku partisipasi politik sebuah masyarakat juga berkaitan dengan perkembangan sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh, Gil de Zúñiga et al. (2012) menyatakan bahwa kehadiran media sosial, seperti *Facebook*, berperan dalam meningkatkan partisipasi politik. Oleh karena itu, muncul dan berkembangnya pandemi Covid-19 menjadi penting untuk dilibatkan dalam diskusi partisipasi politik saat ini. Pandemi Covid-19 tidak

dapat disangkal telah membuat perbedaan pendapat dalam masyarakat. Berbagai perdebatan mengenai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan di masyarakat (PPKM) hingga pemberian vaksinasi pada umumnya akan berujung pada dua pandangan; setuju atau tidak setuju (Hutabarat, 2021). Di Indonesia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah diputuskan untuk ditiadakan di tahun 2022 dan 2023, sehingga kebijakan publik strategis seperti PPKM dan bantuan tunai dapat memengaruhi perilaku partisipasi masyarakat dalam politik. Itu sebabnya, penelitian mengenai partisipasi politik di masa pandemi Covid-19 dianggap sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Hal ini diharapkan dapat mencerminkan partisipasi politik dalam pemilihan serentak tahun 2024.

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, buku ini akan mendiskusikan partisipasi politik menggunakan pendekatan multidisipliner. Pendekatan tersebut adalah *social network analysis* (SNA) yang dapat memotret kompleksitas jaringan sosial seseorang dan menganalisis dampaknya terhadap suatu perilaku (Campbell, 2013; Song et al., 2014). Dalam dua dekade terakhir, SNA sudah sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan berkontribusi pada berkembangnya pengetahuan tentang dampak hubungan interpersonal dalam sebuah jaringan sosial. Dalam pengaplikasiannya, pendekatan SNA dapat dikombinasikan dengan data mengenai karakteristik individu yang berkaitan dengan partisipasi politik, seperti demografi, religiositas, dan pengetahuan politik (Campbell, 2013; Setiawan et al., 2020).

Salah satu riset terkini mengenai partisipasi politik melibatkan faktor keluarga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi. Riset ini membahas tentang hubungan antara perilaku politik dan partisipasi politik dan menganalisis hal tersebut dari monozigot atau kembar identik yang berasal dari Amerika Serikat, Swedia, Jerman, dan Denmark (Weinschenk et al., 2021). Peneliti berasumsi bahwa perilaku politik dan partisipasi politik tidak secara langsung datang dari pikiran seseorang. Seluruh ide tersebut berasal dari pengaruh dari faktor-faktor lain. Salah satunya adalah faktor kekeluargaan. Lingkungan tersebut merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi untuk individu merespon isu tertentu.

Metode yang digunakan untuk menganalisa topik ini adalah dengan melibatkan kembar identik. Alasan spesifiknya adalah bahwa kembar identik berbagi DNA yang sama dan diasumsikan telah dibesarkan dan terpapar lingkungan yang sama. Hal itu memungkinkan kedua variabel untuk diukur secara faktor genetik dan lingkungan. Hasil penelitian berlawanan dengan studi lain yang menyebutkan bahwa pengetahuan dan minat dalam partisipasi politik merupakan sebab-akibat. Namun, secara spesifik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat *confounder* atau faktor lain dalam dinamika hubungan antara

sikap politik dan partisipasi politik. Faktor lain tersebut berupa faktor-faktor keluarga, seperti karakteristik psikologis bawaan dan sosialisasi.

Selanjutnya, terdapat juga penelitian yang fokus pada kecenderungan individu untuk memikirkan masa depannya. Kemampuan untuk mengevaluasi konsekuensi masa depan merupakan aspek mendasar dari pengambilan keputusan manusia (Knudsen & Christensen, 2021), tetapi individu mengevaluasi konsekuensi masa depan dengan cara yang heterogen. Aspek temporal psikologi manusia terus menarik minat di zaman modern. Secara khusus, penelitian ini membahas kerangka temporal spesifik dari orientasi masa depan dan mengkajinya melalui kerangka *consideration of future consequences* (CFC) atau pertimbangan konsekuensi masa depan.

Meskipun topik tersebut hanya mendapat sedikit perhatian hingga beberapa tahun terakhir, orientasi temporal telah ditunjukkan memiliki implikasi untuk bidang politik. Orientasi temporal berbeda dalam komunikasi kampanye politik dan pidato politik, dan perbedaan persepsi waktu terlihat mempengaruhi dukungan untuk kebijakan berorientasi masa depan. Orientasi temporal umum juga muncul dalam pemikiran politik – orang-orang yang berorientasi masa depan dalam kehidupan sehari-harinya juga cenderung demikian untuk masalah politik. Dalam penelitian CFC ini didapatkan bahwa perspektif waktu individu memiliki implikasi penting untuk apakah dan bagaimana orang berpartisipasi dalam politik (Knudsen & Christensen, 2021). Kerangka kerja CFC memberi kita mekanisme yang berguna untuk memeriksa ini, dan data empiris mendukung kesimpulan luas: Bagaimana orang berpikir tentang masa depan tercermin dalam kecenderungan mereka untuk mengambil bagian dalam kegiatan politik tertentu.

Hasil mereka menunjukkan bahwa nilai CFC yang berorientasi jangka panjang/masa depan atau CFC-masa depan yang lebih tinggi terkait dengan partisipasi yang berkaitan dengan kelembagaan dan juga yang tidak berhubungan dengan kelembagaan. Sedangkan CFC-Segera cenderung menekan kecenderungan untuk berpartisipasi, terutama dalam kegiatan yang tidak dilembagakan. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara CFC-masa Depan dan partisipasi yang tidak dilembagakan dimoderasi oleh kepercayaan politik, yang berarti bahwa hanya orang-orang dengan tingkat kepercayaan politik yang rendah bahwa CFC-masa depan meningkatkan kemungkinan partisipasi. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk percaya bahwa mereka yang berpartisipasi dalam aksi politik yang tidak dilembagakan kurang berinvestasi di masa depan daripada mereka yang berpartisipasi dalam bentuk yang lebih dilembagakan.

## **Bab II**

### **Pendekatan Partisipasi Politik**

Ada beragam pendekatan untuk menjelaskan fenomena partisipasi politik. Mulai dari sisi ekonomi (apakah bermanfaat bagi pelaku atau tidak) hingga sisi motivasi. Dalam buku ini, kami akan menjelaskan dua pendekatan sosial. Pertama, pendekatan SNA yang fokus pada jaringan sosial individu dan bagaimana hal tersebut berdampak pada pengambilan keputusan seseorang. Kedua, pendekatan identitas sosial yang fokus pada kategorisasi sosial yang bermakna bagi seorang individu dan bagaimana keanggotaan dengan kelompok sosial tersebut berdampak pada perilaku sosialnya.

#### **1. Pendekatan *social network analysis***

Studi tentang partisipasi politik telah lama melahirkan dua sudut pandang literatur, satu berpusat pada individu dan yang lainnya pada jaringan sosial (Campbell, 2013). Akan tetapi, kedua sudut pandang ini sebetulnya saling melengkapi, bahkan tidak terpisahkan. Dalam praktiknya, sangat sulit untuk melihat individu hanya dari variabel individunya tanpa mempertimbangkan bahwa variabel individu tersebut berpengaruh atau dipengaruhi oleh jaringan sosialnya. Contohnya, tingkat pendidikan yang tinggi dari seorang individu tentunya akan menempatkan dirinya pada jaringan sosial yang berbeda daripada tingkat pendidikan yang menengah ke rendah. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku partisipasi politik tim peneliti akan mempertimbangkan karakteristik individu dan memasukkannya ke dalam konteks hubungan sosial.

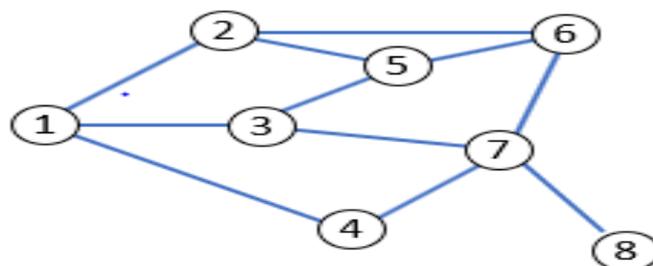
Pentingnya jaringan sosial dalam partisipasi politik sebetulnya sudah lama diteliti. Huckfeldt dan Sprague (1995, dalam Campbell, 2013) secara konsisten menunjukkan bahwa komunitas dan jaringan sosial dapat menjelaskan beragam aspek dari perilaku politik. Mereka berargumen bahwa penjelasan karakteristik individu dan jaringan sosial saling menguatkan. Hal ini senada dengan ilmu sosiologi yang memandang bahwa jaringan sosial adalah faktor utama untuk menjelaskan aktor partisipasi politik. Oleh karena itu, tim peneliti pun berpandangan bahwa untuk melihat partisipasi politik dibutuhkan kombinasi antara pengukuran karakteristik individu sekaligus pemetaan jaringan sosial agar penjelasannya menjadi komprehensif.

Di sisi lain, istilah partisipasi adalah sebuah konstruk yang memiliki ragam aspek dalam ilmu sosial. Dalam psikologi dan sosiologi, partisipasi biasanya dikaitkan dengan pemberdayaan (Huis et al., 2017; Oladipo, 2010) (Huis et al., 2017; Oladipo, 2010). Dalam

hal ini, partisipasi dimaknai sebagai seberapa jauh individu menggunakan sumber daya yang ada dalam jaringan sosialnya untuk mengaktualisasi dirinya (Gil de Zúñiga, 2012). Di sisi lain, partisipasi juga sering dipandang sebagai upaya atau pergerakan kolektif untuk memperbaiki keadaan kelompoknya (Smith & Pettigrew, 2015; van Stekelenburg & Klandermans, 2013). Di saat yang bersamaan, perilaku ini juga harus dilihat sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan kehadiran media sosial yang sering digunakan untuk aktivitas politik, penelitian tentang partisipasi politik juga baiknya mempertimbangkan keberadaan media sosial (Jandevi, 2019). Berdasarkan sifatnya yang multidimensi, partisipasi politik harus dipandang dalam tiga dimensi perilaku, yaitu 1) keterlibatan sebagai warga sipil (seperti melakukan piket menjaga lingkungan rumah), 2) partisipasi politik secara offline (seperti menghadiri kampanye), dan 3) partisipasi politik secara online (seperti berdiskusi politik di grup Facebook) (Gil de Zúñiga, 2012).

Untuk lebih jelasnya, kami akan menjelaskan tentang SNA dan aplikasinya dalam penelitian partisipasi politik. Dalam kerangka kerja SNA, jaringan sosial dikonseptualisasikan sebagai sebuah grafik yang terdiri dari *node* atau individu dan *edge* atau hubungan antarindividu (Borgatti & Lopez-Kidwell, 2014). Bagan 1 menunjukkan contoh dari sebuah jaringan sosial yang terdiri dari 8 individu.

Bagan 1. Jaringan sosial antara delapan individu (Setiawan et al., 2021)



Berdasarkan Bagan 1, angka merujuk pada *node* sedangkan garis merujuk pada adanya atau tiadanya hubungan antarindividu. Jaringan dari Bagan 1 di atas dapat direpresentasikan sebagai matrix  $M_{ij}(n \times n)$ , dimana  $n$  adalah jumlah *node*. Jika ada hubungan antara *node*  $i$  dan  $j$ , maka kita biasanya memberikan angka 1 ( $M_{ij} = 1$ ). Tetapi jika tidak ada hubungan, maka kita gunakan angka 0 untuk menggambarkan ketiadaan hubungan tersebut ( $M_{ij} = 0$ ). Kembali pada Bagan 1, oleh karena itu, jaringan dalam Bagan 1 dapat disimpulkan sebagai matriks berikut ini:

Bagan 2. Matriks jaringan sosial sebuah individu/kelompok (Setiawan et al., 2021)

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	1	1	0	0	0	0
2	1	0	0	0	1	1	0	0
3	1	0	0	0	1	0	1	0
4	1	0	0	0	0	0	1	0
5	0	1	1	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	1	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	0	0	0	1	0

Berdasarkan matriks di atas, maka urutan hubungan adalah sebagai berikut:

- Hubungan terdekat 1: 2,3,4
- Hubungan terdekat 2: 1,5,6
- Hubungan terdekat 3: 1,5,7
- Hubungan terdekat 4: 1,7
- Hubungan terdekat 5: 2,3,6
- Hubungan terdekat 6: 2,5,7
- Hubungan terdekat 7: 3,4,6,8
- Hubungan terdekat 8: 7

Struktur jaringan sosial inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai analisis untuk melihat dampaknya terhadap partisipasi politik.

Aplikasi SNA berfungsi untuk mengembangkan peta jalan yang komprehensif dalam memprediksi partisipasi politik masyarakat Indonesia. Peta jalan akan memuat gambaran model teoretik partisipasi politik, khususnya di masa pandemi Covid-19. Model teoretik ini akan menjelaskan asosiasi antara pengaruh jaringan sosial dengan karakteristik individu dan dampaknya terhadap partisipasi politik. Model ini juga nantinya akan diuji di lokasi penelitian. Setelahnya, model teoretik akan dikembangkan menjadi modul pembelajaran partisipasi politik yang melibatkan perspektif ilmu politik, psikologi, dan network analysis. Melalui pendekatan multidisiplin ini kami berharap dapat menjelaskan partisipasi politik di

masa pandemi Covid-19 secara lebih komprehensif dan memperkaya literatur ilmu sosial. Bagan 2 menunjukkan secara rinci peta jalan penelitian ini.

Sama halnya dengan isu pandemi Covid-19, penelitian yang menggunakan metode SNA dalam investigasinya masih sangat jarang. Kebanyakan dari literatur yang ada fokus pada peran media sosial terhadap partisipasi politik. Ada pun studi dari Aspinall (2014) berargumentasi bahwa melihat sebuah jaringan dalam pemenangan sebuah pemilihan sangatlah penting. Perantara antara kandidat dan pemilih ditinjau dalam sebuah jaringan sosial, di mana terdapat beberapa jenis perantara yang dapat berdampak pada hasil pemilihan. Oleh karena itu, terdapat peluang yang besar dalam investigasi partisipasi politik melalui pendekatan jaringan sosial seseorang.

#### *4.3 Apa saja yang diketahui mengenai dampak dari jaringan sosial seseorang terhadap perilaku partisipasi politiknya?*

Berdasarkan studi Aspinall (2014), perhelatan pemilihan di Indonesia ditentukan oleh keberadaan perantara. Meski hal ini terdengar hanya sebatas penjual dan pembeli, studi tersebut menyebutkan bahwa hubungan personal juga menjadi salah satu faktor perantara menjual dan memenangkan seorang kandidat. Selain itu, penelitian-penelitian yang ada di dalam tinjauan ini menunjukkan bahwa faktor orang memilih seorang kandidat dapat berdasarkan atas identitas gender dan agamanya (contoh: Yolanda dan Halim 2020; Rhoads 2012).

Sehubungan dengan penemuan-penemuan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik sangat penting untuk ditinjau melalui pendekatan jaringan sosial, khususnya menggunakan metode SNA. Metode ini tidak hanya dapat melihat bagaimana kesamaan seseorang (berdasarkan sosiodemografi) berdampak pada perilaku partisipasi politiknya, namun juga dapat memetakan aktor-aktor sosial yang menjadi pengaruh penting dalam menentukan perilaku elektoral (Campbell, 2013; McClurg, 2003; Song et al., 2014).

Terdapat kekurangan dalam penelitian *scoping review* ini. Kekurangan utama adalah penelitian berhenti di awal tahun 2022, sehingga penelitian-penelitian terbaru mengenai prediksi partisipasi politik di masa pandemi tidak dapat dilibatkan. Akan tetapi, penelitian ini tetap memiliki beberapa implikasi untuk kebijakan dan penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan SNA perlu dikembangkan agar menjadi tambahan empiris mengenai pengaruh identitas dan pola perilaku aktor sosial dalam jaringan sosial seorang individu dalam perilaku partisipasi politiknya. Hasil dari penelitian tersebut dapat berkontribusi untuk menjelaskan mekanisme psikologis perilaku partisipasi politik pada

individu. Kedua, *scoping review* ini dapat menjadi landasan mengenai perkembangan demokrasi dan hal-hal apa yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pusat guna meningkatkan kesadaran politik, baik yang bersifat elektoral maupun yang bersifat kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, melakukan forum diskusi untuk perbaikan komunitas, dll.

## **2. Pendekatan teori identitas sosial**

Teori identitas sosial (SIT) telah banyak dipelajari dalam situasi prasangka dan konflik (Chider & Dayton, 2011). Agak terinspirasi oleh RCT, Tajfel mengusulkan bahwa pengembangan identifikasi ingroup adalah fenomena mental yang tertanam dalam konflik antarkelompok, termasuk dalam kerangka RCT (Tajfel & Turner, 1979). Studi seperti Tajfel & Turner (1979), Shamir & Sagiv-Schifter (2006), Schneider (2008) dan Tolsma, Lubbers & Coenders (2008), semua sepakat bahwa konflik kepentingan diri dan kelompok meningkatkan identifikasi dengan ingroup. Mengikuti warisan Tajfel (Turner, 1975; Insko, Schopler, Kennedy, Dahl, Graetz & Drigotas, 1992), kondisi ini cukup dan juga diperlukan untuk mendorong ingroup favoritism dan diskriminasi terhadap outgroup. Pada bagian ini, saya akan memaparkan secara singkat pemahaman tentang SIT dan implikasinya dalam situasi konflik. Saya akan melakukan ini dengan terlebih dahulu menjelaskan pengertian dasar dan definisi istilah-istilah penting dalam teori. Kedua, saya akan membahas arti-penting identitas dari perspektif Phinney (2001) dan Phinney & Ong (2007). Dan terakhir, untuk tujuan penelitian ini, saya akan menjelaskan identitas agama dengan melabuhkan identitas sosial ke dalam penjelasannya.

SIT menyangkut dua proses hubungan sosial, yaitu proses individu dan proses sosial (Tajfel, 1974; Tajfel & Turner, 1979). Dalam hal ini, kedua proses tersebut disebut perilaku interpersonal sebagai yang pertama dan perilaku antarkelompok sebagai yang terakhir. Pada posisi ekstrimnya (yang jarang ditemukan), perilaku interpersonal adalah interaksi antara dua atau lebih individu yang sepenuhnya dipengaruhi oleh hubungan interpersonal dan karakteristik individu mereka (Tajfel & Turner, 1979). Adapun perilaku antarkelompok adalah interaksi antara dua atau lebih individu yang sepenuhnya dipengaruhi oleh keanggotaan mereka dalam kelompok atau keanggotaan sosial. Untuk memperluas pemahaman kita tentang SIT, paragraf berikut akan membahas istilah-istilah penting dan definisi mereka dalam teori.

Sebelum kita melanjutkan ke konsep penting yang digunakan dalam teori, penting untuk mendefinisikan kelompok sesuai dengan SIT. Kelompok dapat didefinisikan sebagai “entitas kognitif yang bermakna bagi subjek pada titik waktu tertentu” (Tajfel, 1974, hal. 69). Definisi

ini menandakan dua ciri penting, pertama adalah kepentingan kelompok bersifat subyektif dan kedua adalah dapat diubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kelompok dalam SIT tidak selalu mengacu pada keanggotaan tatap muka agar individu merasa menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu, misalnya kelompok agama.

Sekarang kita dapat beralih ke empat konsep atau istilah utama yang digunakan dalam SIT, yaitu kategorisasi sosial, identitas sosial, perbandingan sosial, dan perbedaan psikologis (Tajfel, 1974). Kategorisasi sosial mengacu pada proses penataan lingkungan sosial dengan mengkategorikan orang dalam kelompok dengan cara yang bermakna atau penting bagi subjek. Kategorisasi sosial juga dapat dilihat sebagai proses pembentukan atau penyatuan kelompok sesuai dengan sikap dan keyakinan individu. Sehubungan dengan konflik antarkelompok, kategorisasi sosial pada dasarnya merupakan faktor penting untuk bias dan stereotip ingroup, yang umumnya ditemukan dalam konflik (Cuhadar & Dayton, 2011). Untuk merasa positif tentang keanggotaan ingroup, setiap individu cenderung menerapkan karakteristik yang disukai untuk kelompoknya sendiri dan pada saat yang sama merendahkan outgroup (Tajfel, 1981; Baumeister & Leary, 1995; Savelkoul et al., 2010). Kecenderungan ini diturunkan dari generasi ke generasi dengan menggunakan hukum universal bahwa setiap anak adalah anggota dari kelompok orang tuanya (Allport, 1958). Anak kemudian diharapkan menerima pandangan orang tua terhadap outgroup, termasuk prasangka. Selanjutnya, seperti banyak teori sosial lainnya, kategorisasi sosial terkait dengan konteks sosial (Shamir & Sagiv-Schifter, 2006).

Konteks ini kemudian mempengaruhi arti-penting kategorisasi sosial, dan pada gilirannya identitas sosial masyarakat. Hubungan ini menentukan keterikatan ingroup dan hubungan outgroup orang (Brewer, 2001). Pada saat konflik antarkelompok, keterikatan ingroup sering meningkat dan karenanya, bias ingroup meningkat, dan negativitas outgroup. Seperti yang dinyatakan oleh Tajfel dan Turner (1979), semakin intens konflik antarkelompok, semakin tinggi kecenderungan individu akan berperilaku terhadap anggota outgroup sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Peneliti lain juga menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai kondisi pemicu yang menginduksi hubungan timbal balik antara identifikasi ingroup yang kuat dan permusuhan outgroup (Brewer, 1999; Duckitt, 2003). Brewer (2001) mengistilahkan hubungan tersebut sebagai ingroup love dan outgroup hate.

Singkatnya, SIT berpendapat bahwa orang mendefinisikan diri mereka sebagai bagian dari kelompok tertentu dan secara otomatis membedakan mereka secara sosial dari orang lain yang bukan bagian dari kelompok pilihan mereka, seperti klub sepak bola, atau kelompok sosial tertentu, seperti ras dan jenis kelamin. Dengan memiliki keanggotaan kelompok,

individu mungkin memiliki harga diri yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih baik (Tajfel & Turner, 1979; Branscombe, Schmitt, & Harvey, 1999; Ysseldyk et al., 2010). Fenomena universal ini dilakukan melalui kategorisasi sosial, di mana orang mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok berdasarkan makna subyektifnya yang dapat memberikan identitas sosial yang positif. Begitu orang mengembangkan identitas sosial mereka, mereka cenderung terus-menerus membandingkan kepositifan mereka dengan kelompok luar yang serupa. Kecenderungan ini memiliki dua fungsi, satu untuk mempertahankan atau mencapai keunggulan dan yang lainnya untuk menjaga kekhasan mereka.

### **Bab III**

#### **Scoping Review Penelitian Partisipasi Politik**

Dalam bab ini, kami merangkum penelitian *scoping review* yang telah kami lakukan yang fokus pada gambaran kondisi partisipasi politik di masa pandemi Covid-19 dan sejauh mana pendekatan SNA digunakan. Jika pembaca tertarik untuk melihat penelitian penuhnya, mereka dapat mengakses Halaman ini: <https://doi.org/10.28932/humanitas.v6i2.5620>

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Dalam upaya memperkaya khazanah di bidang ilmu psikologi sosial dan politik di Indonesia, di sini para peneliti bermaksud melakukan penelitian partisipasi politik dengan menggunakan pendekatan *network analysis* (NA) agar melengkapi perspektif yang sudah ada. Pendekatan NA dapat memotret kompleksitas jaringan sosial seseorang dan menganalisis dampaknya terhadap suatu perilaku (Campbell, 2013; Westaby et al., 2014). Dalam dua dekade terakhir, NA sudah sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan berkontribusi pada berkembangnya pengetahuan tentang dampak hubungan interpersonal dalam sebuah jaringan sosial (Marin & Wellman, 2015; Setiawan & Suhartomo, 2019). Dalam penggunaannya dalam ilmu sosial, NA sering juga disebut dengan istilah *social network analysis* (SNA).

Untuk keperluan tersebut, tim peneliti mengajukan metode *scoping review* sebagai metode untuk melakukan peninjauan literatur tentang partisipasi politik di Indonesia yang dilihat dari jaringan sosial individu. *Scoping review* sendiri telah menjadi tambahan metode dalam penelitian yang berguna untuk memberikan ringkasan tentang literatur yang sudah ada mengenai sebuah topik (Arksey & O'Malley, 2005). Kajian *scoping review* berbeda dari *systematic review* (tinjauan sistematis) dalam beberapa hal. Namun, hal yang paling menonjol adalah tinjauan sistematis biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang tepat, memberikan kesimpulan kritis terhadap beragam studi yang diulas, dengan metodologi yang ditentukan untuk menilai kualitas artikel (O'Brien et al., 2010). Di sisi lain, *scoping review* biasanya digunakan untuk mengulas topik penelitian yang masih dianggap sedikit, sehingga metode ini menggabungkan literatur yang mencakup berbagai desain studi.

## 2. Metode

Metode *scoping review* yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan kerangka kerja *scoping review* yang diajukan oleh Arksey dan O'Malley (2005). Berdasarkan studi mereka, penelitian ini berguna untuk menemukan apakah nantinya tinjauan sistematis diperlukan, untuk meringkas temuan penelitian yang sudah ada, dan untuk melaporkan potensi kesenjangan penelitian yang ada dalam literatur yang tersedia. *Scoping review* dalam penelitian ini akan mempertimbangkan temuan penelitian yang dipilih dan menarik kesimpulan dari sekumpulan penelitian yang dipilih.

### *Menemukan studi yang relevan*

Tabel 1 menunjukkan kata kunci pencarian yang digunakan dalam studi ini. Menurut Arksey dan O'Malley (2005), definisi kata kunci disarankan mencakup konsep yang luas sehingga pencarian dapat mencakup secara luas literatur yang tersedia. Untuk itu, konsep-konsep utama dan istilah pencarian dikembangkan untuk menjaring literatur yang terkait dengan partisipasi politik di Indonesia, partisipasi politik di masa pandemi, dan partisipasi politik ditinjau dari SNA.

Tabel 1. Kata kunci pencarian

---

Kata kunci pencarian
<ul style="list-style-type: none"><li>● Partisipasi politik di Indonesia; Partisipasi politik dan Covid-19; Partisipasi politik selama wabah dan Indonesia</li><li>● <i>Presidential election in Indonesia; Presidential election in Indonesia and social network; 2024 election in Indonesia and social network; Indonesia elektoral dan Covid-19; Pemilihan legislatif di Indonesia; Pemilihan presiden (ATAU Pilpres) dan pandemi Covid-19; Pilpres 2024 dan Covid-19; Pemilihan legislatif (ATAU Pileg) 2024 dan Covid-19; Elektoral dan Covid-19;</i></li><li>● Partisipasi politik Indonesia dan jaringan sosial; Partisipasi politik Indonesia dan <i>social network</i></li></ul>

---

Setelah itu, perlu dipertimbangkan kepraktisan yang berkaitan dengan waktu dan biaya. Maka, studi ini mengembangkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai penyaring literatur yang tersedia. Sebagai contoh, seperti yang telah dijelaskan di pendahuluan, partisipasi politik erat kaitannya dengan perkembangan sosial yang ada (Gil de Zúñiga et al. 2012). Oleh karena itu, mencakup penelitian mengenai partisipasi politik di tahun 1960 tidaklah terlalu relevan ketika ingin membicarakan tentang partisipasi politik masa kini.

Berdasarkan hal tersebut, kami menentukan untuk membatasi penelitian maksimal di 15 tahun terakhir. Tabel 2 menampilkan daftar lengkap kriteria inklusi dan eksklusi. Pencarian dilakukan dalam delapan *database* elektronik berikut ini: Garuda, ISJD/LIPI, Perpustnas, Springer, Wiley *online library*, Taylor & Francis, Science direct, dan SAGE. Kami menyelesaikan tinjauan literatur selama empat bulan, mulai dari Januari 2022 hingga Mei 2022.

Tabel 2. Daftar kriteria inklusi dan eksklusi

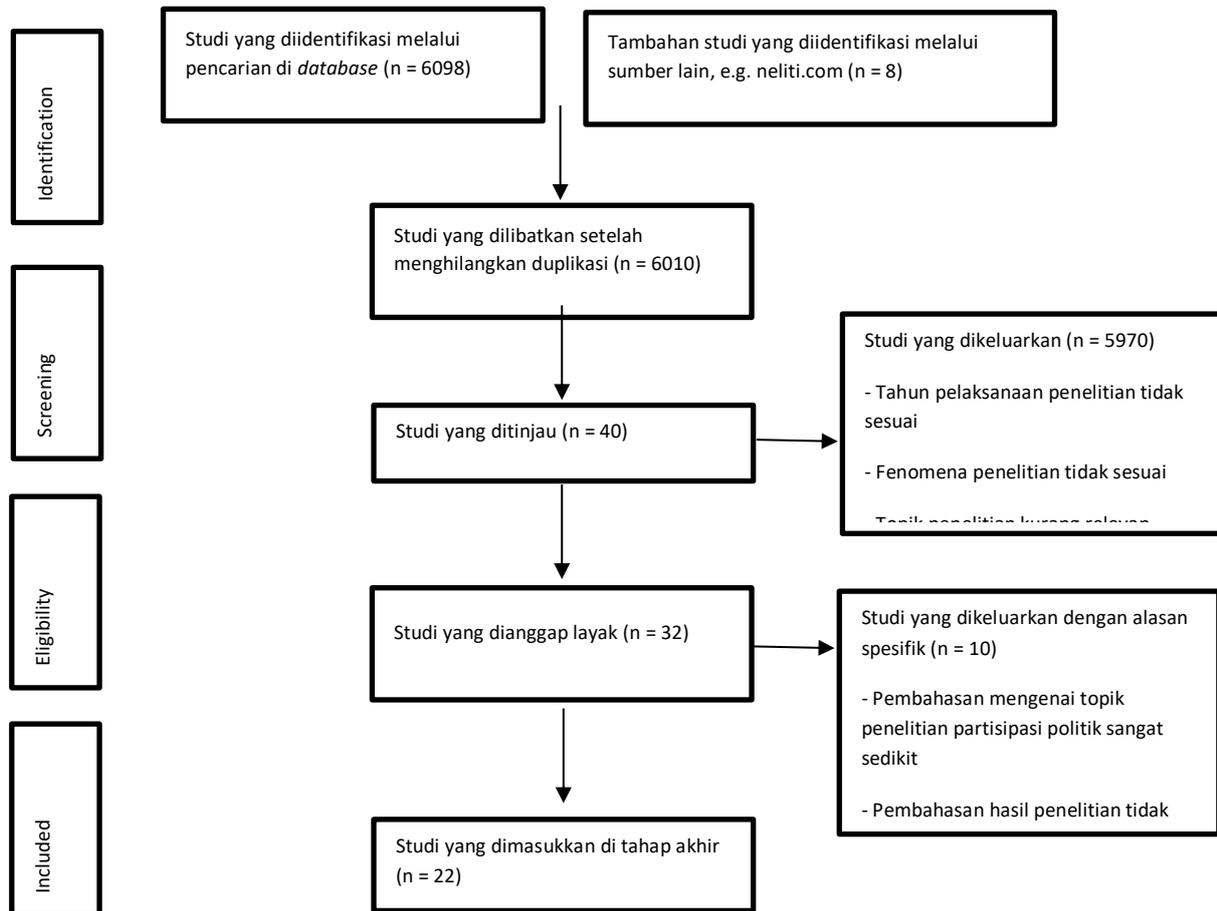
Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Tahun	15 tahun terakhir	Di atas 15 tahun
Negara	Indonesia	Penelitian di luar negara Indonesia
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Inggris	Penelitian menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia dan Inggris
Jenis artikel/penelitian	Penelitian orisinil diterbitkan di dalam jurnal <i>peer-reviewed</i>	Penelitian yang dipublikasikan tanpa <i>peer-review</i>
Fokus penelitian	Partisipasi politik dalam memilih di Indonesia ( <i>electoral participation</i> ) Partisipasi politik selama pandemi Covid-19 di Indonesia Partisipasi politik selama wabah (lainnya) di Indonesia	Variabel/perilaku selain memilih dalam pemilihan politik
Fokus literatur/kerangka teoretik	Penelitian yang fokus utamanya menggunakan kerangka kerja SNA	Kerangka konseptual selain SNA
Populasi dan sampel	Siapa pun yang berwarga negara Indonesia dan berhak memilih	Di luar usia memilih

### 2.3 Pemilihan studi yang relevan

Menggunakan daftar kata kunci di Tabel 1, kami mendapatkan sebanyak 6106 artikel. Berdasarkan tinjauan abstrak, kami berhasil memisahkan sejumlah besar artikel yang tidak relevan, terutama yang terkait dengan partisipasi politik di Indonesia, perilaku *electoral*, dan

partisipasi politik masyarakat Indonesia di daerah tertentu di masa pandemi. Selain karena duplikasi, artikel-artikel yang dikeluarkan juga karena membicarakan tentang rekrutmen anggota partai politik, rekrutmen calon anggota legislatif, pola komunikasi partai politik, dan persepsi publik mengenai pemilihan serentak. Dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi secara ketat, terdapat 21 studi yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Kami menggunakan teks lengkap dari 21 artikel tersebut untuk ditinjau secara mendalam. Proses pemilihan artikel mengikuti panduan *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR)* (Tricco et al., 2018). Gambar 1 menggambarkan lebih lanjut proses pemilihan artikel. Dalam gambar tersebut dipaparkan bahwa sejumlah penelitian dikeluarkan karena duplikasi maupun topik yang tidak relevan.

Gambar 1. Proses seleksi studi



### 3. Hasil tinjauan

*Scoping review* ini melibatkan 22 artikel yang menggunakan Bahasa Inggris maupun Indonesia, dan semuanya dilaksanakan di Indonesia. Secara khusus, bagian ini menyajikan topik-topik yang berasal dari 22 artikel yang menjadi fokus dari pertanyaan penelitian awal

kami. Topik-topik tersebut adalah partisipasi politik di Indonesia, karakteristik demografi yang menjadi fokus dalam partisipasi politik, kaitan antara media sosial dan partisipasi politik, dan dampak pandemi Covid-19 pada partisipasi politik di Indonesia.

### *3.1 Gambaran partisipasi politik di Indonesia*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sumedang, masyarakat di tingkat lokal (kota) cukup memahami pentingnya partisipasi politik masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah membuat mereka tidak terlalu bersemangat dalam berpartisipasi, khususnya dalam pemilihan elektoral (Djuyandi et al., 2021). Ada pun dalam penelitian tersebut, faktor-faktor yang menghambat meningkatnya partisipasi politik adalah keterbatasan akses untuk mengeluarkan aspirasi politik dan pendidikan tentang politik dan kenegaraan yang dianggap masih rendah. Menurut Pontoh (2014) dan Maimun (2021), faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi elektoral adalah citra kandidat, isu dan program calon, sekaligus identifikasi individu dengan partai tertentu.

Sehubungan dengan faktor pendidikan, ternyata ditemukan bahwa ia tidak berkorelasi positif dengan partisipasi politik (Parinduri, 2019). Faktor ini juga tidak berdampak pada pertimbangan perihal agama, etnis, penampilan maupun gender dalam memilih kepala daerah. Selain itu, berdasarkan penelitian di Aceh Tengah oleh Kelana (2015), mayoritas penduduk yang memiliki hak memilih cenderung memiliki sikap apatis jika terjadi kesalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT). Akan tetapi, sinyal positif didapatkan mengenai peningkatan jumlah partisipan dalam pemilihan presiden di tahun 2014 di kota Jayapura, Papua (Fonataba, 2016).

### *3.2 Karakteristik demografi yang menjadi fokus dalam partisipasi politik*

Dari studi yang dilakukan oleh Yolanda dan Halim (2020), didapatkan temuan bahwa pemilih berusia muda (generasi Z) banyak mencari informasi mengenai Pilpres 2019. Halimatusa'diyah dan Prihatini (2021) juga menemukan bahwa masyarakat berusia muda yang menikah lebih besar kecenderungannya untuk memilih dibandingkan mereka yang tidak menikah. Namun, hal ini hanya berlaku pada pemilihan legislatif (Pileg) dan presiden (Pilpres), sedangkan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak ada perbedaan di antara mereka yang menikah dan tidak menikah. Ditambahkan, pandangan umum tentang kemampuan politisi laki-laki dan perempuan berpengaruh terhadap perilaku memilih dalam Pileg (Prihatini, 2018).

Studi lain menunjukkan adanya tingkat yang rendah dalam partisipasi di antara perempuan, khususnya di Provinsi Bali (Rhoads, 2012). Hal ini berkaitan dengan politik uang yang meluas, revitalisasi lembaga politik, identitas lokal, dan memori kolektif tentang

pembubaran Gerakan Perempuan Indonesia (Gerwani) di tahun 1960an. Wardani dan Subekti (2021) menyatakan hal yang sama tentang partisipasi perempuan dalam politik. Mereka menunjukkan bahwa terdapat stagnasi dalam representasi perempuan di politik Indonesia.

Selain gender, etnis juga penting untuk dilihat dalam partisipasi politik. Karundeng (2015) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dalam Pilpres di Kota Manado sangat berkaitan dengan identifikasi partai dari kedua pasangan calon serta rekam jejak mereka.

Terakhir, studi sebelumnya juga telah melihat perilaku partisipasi politik pada penyandang disabilitas. Alam, Nasir, dan Elwan (2019) menyatakan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Muna cenderung untuk memilih dalam perhelatan Pileg.

### *3.3 Kaitan antara media, jaringan sosial, dan partisipasi politik*

Saud dan Margono (2021) menyatakan bahwa pemilih generasi Z semakin berpartisipasi melalui platform media sosial dalam berbagai kegiatan, seperti protes untuk undang undang baru. Media, dikatakan oleh Pakpahan dan Chandra (2009), membantu menyebarkan visi dan misi kandidat dalam Pilpres. Akan tetapi, media tidak banyak berperan dalam memengaruhi karena pemilih cenderung sudah memiliki pilihannya. Di sisi lain, Darwin dan Haryanto (2021) menunjukkan bahwa calon legislatif (caleg) perempuan menggunakan media sosial dalam strategi sosial kampanyenya, yaitu melalui identifikasi keagamaan. Meski memiliki peranan tertentu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media juga perlu diatur dalam penggunaan teknologi dan penyebaran informasi (Pratama & Sadewo, 2015).

Hal menarik yang perlu diperhatikan adalah keberadaan perantara dalam perhelatan pemilihan. Menurut Aspinall (2014), keberadaan perantara merupakan refleksi bahwa jaringan sosial penting dalam partisipasi politik. Keberadaan perantara juga penting dalam proses pemenangan sebuah kandidat.

### *3.4 Dampak pandemi Covid-19 pada partisipasi politik di Indonesia*

Imran et al. (2021) menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 ternyata tidak menurunkan tingkat partisipasi elektoral masyarakat dalam pemilihan Walikota Makassar di Desember 2020. Bahkan, tingkat ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Ditambahkan, dengan adanya situasi pandemi, kampanye digital menjadi pilihan efektif untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai maupun kandidatnya (Dari & Humau, 2020).

## **Bab IV**

### **Penelitian Perilaku Memilih di masa Covid-19**

Sama halnya dengan bab sebelumnya, bab ini akan merangkum penelitian kedua yang kami lakukan yang berkaitan dengan investigasi partisipasi politik di era pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode survei sebagai pengumpulan data dan dilakukan dengan menggunakan metode gabungan, yaitu daring dan tatap muka. Dengan melibatkan 4 kota kabupaten, kami berhasil mengumpulkan lebih dari 300 partisipan yang diperoleh melalui teknik *random sampling*. Mengingat bahwa karya ilmiah mengenai penelitian ini masih sedang dalam proses *peer review* ketika buku ini dibuat, maka kami hanya dapat memberikan poin-poin utama penelitian.

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan penelusuran *scoping review* yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa topik partisipasi politik, khususnya perilaku elektoral di masa pandemi Covid-19 masih jarang dilakukan. Untuk mengisi kekosongan literatur tersebut, kami akan fokus pada niat perilaku individu untuk memilih pada pemilu 2024. Niat perilaku adalah fokus teori perilaku terencana (TPB) oleh Ajzen dan Fishbein (1977). Gagasan tersebut mengklaim bahwa ada hubungan yang kuat antara sikap dan perilaku, hanya jika ada niat yang kuat untuk melakukan perilaku tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi niat individu untuk melakukan perilaku tertentu, maka semakin besar kemungkinan individu akan melakukan perilaku tersebut.

Untuk tetap dalam relevansi konteks penelitian, kami juga akan menggunakan analisis jaringan sosial (SNA) dalam kombinasi dengan gagasan identitas sosial. SNA telah terbukti mampu menangkap kompleksitas jaringan sosial seseorang dan menganalisis dampaknya terhadap perilaku, misalnya perilaku politik (Campbell, 2013). Di saat yang bersamaan, identitas sosial diperlukan untuk melengkapi SNA karena dengan melihat bagaimana orang mengidentifikasi diri mereka dengan identitas sosial yang bermakna penting bagi dirinya, kita dapat memahami tentang peran identitas ini dalam memprediksi perilaku sosial yang penting. Dalam hal ini, kami memilih identitas keagamaan sebagai identitas fokus karena religiusitas telah terbukti menjadi semakin penting setelah era reformasi dan banyak orang Indonesia sekarang berpegang pada pandangan yang lebih konservatif tentang keyakinan agama di ruang publik (Hadiz, 2017; Mulia, 2011).

Dalam penelitian ini, kami melakukan prosedur pengumpulan data campuran; daring dan luring. Prosedur online diperlukan karena protokol Covid-19 sekaligus mengantisipasi tingkat respons yang rendah saat melakukan survei offline, atau sebaliknya.

## **2. Metode**

Kami memilih beberapa lokasi penelitian yaitu Denpasar, Semarang, Medan dan Jakarta dan sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) karena dua alasan. Pertama, lokasi selain Jakarta berperan sentral dalam menentukan hasil pemilihan umum. Namun, kedua tempat ini sering diabaikan dalam penelitian yang ada. Dua, semua lokasi mencakup cakupan yang luas di Indonesia dan dengan demikian memperluas generalisasi. Secara rinci, untuk survei lapangan, kami sengaja memilih Denpasar dan Semarang sebagai lokasi penelitian. Di setiap lokasi, kami bertujuan untuk menggunakan metode pengambilan sampel acak dalam mengumpulkan data. Karena kami tidak dapat mengakses daftar populasi untuk setiap kota, kami menggunakan 'jalan acak' untuk mengejar pengambilan sampel acak. Jalan acak dilakukan dengan terlebih dahulu memilih titik awal/alamat, biasanya di dekat kantor pemda, kemudian memilih rumah tangga/individu pertama dengan interval tiga kali.

Lokasi penelitian terpilih yang tersisa menggunakan survei online. Untuk survei ini, pertama-tama kami membuat kuesioner online menggunakan platform Qualtrics. Serupa dengan kuesioner di tempat, kuesioner Qualtrics menyertakan latar belakang penelitian singkat, karakteristik sampel, dan persetujuan tertulis yang mengharuskan peserta untuk secara aktif memilih "Setuju untuk berpartisipasi" atau "Tidak setuju untuk berpartisipasi". Jika yang pertama dipilih, Qualtrics akan memungkinkan peserta untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Jika yang terakhir dipilih, peserta akan dialihkan ke akhir survei. Kami menggunakan prosedur acak dalam mendistribusikan tautan.

## **3. Hasil penelitian**

Berdasarkan pengolahan data yang kami lakukan, ada beberapa penemuan yang secara singkat dapat kami sampaikan di sini: Pertama, kami tidak menemukan bukti bahwa karakteristik jaringan sosial individu, terutama frekuensi interaksi dan terlibat dalam diskusi sosial-politik dengan anggota jaringan mereka terkait dengan niat mereka untuk memilih pada pemilihan umum Indonesia 2024. Kami berasumsi bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia kemungkinan masih menganggap keputusan politik sebagai urusan pribadi sehingga menghalangi mereka untuk membicarakan persoalan sosial politik secara bebas.

Kedua, kami menemukan bahwa religiosentrisme berhubungan negatif dengan niat perilaku individu untuk memilih pada pemilu Indonesia 2024. Dengan kata lain, mereka yang mempersepsikan ingroup keagamaannya secara positif dan pada saat yang sama mempersepsikan outgroup keagamaannya secara negatif lebih cenderung tidak memilih pada pemilu Indonesia 2024. Religiosentrisme kemungkinan terkait dengan keyakinan yang lebih konservatif dan narasi bahwa umat Islam telah lama tertindas di negara ini dan pemilu yang demokratis tidak sepenuhnya sejalan dengan keyakinan tersebut (Hadiz, 2017; Setiawan et al., 2020).

Ketiga, kami menemukan bahwa partisipasi politik offline memainkan peran penting dalam meningkatkan niat individu untuk memilih, bahkan selama pandemi Covid-19. Temuan ini menarik karena pada masa awal pembatasan sosial pandemi Covid-19, muncul segudang keluhan terhadap keputusan pemerintah sekaligus permintaan bantuan sosial bagi mereka yang terjangkit berat. Meskipun dilaporkan bahwa pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah pada akhirnya memberikan bantuan yang diperlukan untuk rumah tangga yang terkena dampak (SMERU et al., 2021), kami tetap berasumsi bahwa diskusi Covid-19 di antara masyarakat dapat menghasilkan beragam persepsi terhadap pemilihan umum mendatang.

## **Bab V**

### **Rancangan Belajar Mata Kuliah Partisipasi Politik**

Berdasarkan aktivitas penelitian yang telah dilakukan, kami melihat bahwa topik partisipasi politik dapat menjadi sebuah mata kuliah yang dapat diajarkan di perguruan tinggi. Sifatnya yang multidisipliner menjadikan topik partisipasi politik menjadi mata kuliah yang dapat diterima di lintas jurusan. Berbicara perilaku partisipasi, tentunya kita perlu melibatkan cabang ilmu psikologi yang dapat menjelaskan dari perspektif individu proses kognitif dan afektif apa yang terjadi yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang dalam bertindak. Di sisi lain, komunikasi massa dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan memilih pada individu juga perlu diikutsertakan. Sedangkan pembahasan SNA tidak luput dari pembahasan matematis mengenai teori sebuah jaringan dan hal-hal yang terkait di dalamnya, seperti sentralitas, kepadatan dan sebagainya.

Untuk itu, kami telah mempersiapkan rancangan rencana pembelajaran semester (RPS) yang dapat dijadikan acuan untuk membawa topik partisipasi politik sebagai bahan ajar. Tentunya pembaca dapat memodifikasi RPS tersebut untuk disesuaikan dengan kebutuhannya. Berikut di bawah ini kami tunjukkan RPS partisipasi politik dengan bobot 2 SKS:

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI</b>	
	<b>KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-SIKAP</b>	
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
	<b>KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN UMUM LEVEL 6 D4/S1</b>	
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.	
<b>KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN KHUSUS LEVEL 6 (D4 / S1)</b>		
KK3	Mampu menganalisis persoalan sosial terkait perilaku politik, khususnya yang berhubungan dengan perilaku memilih, serta menyajikan alternatif pemecahan dari masalah yang ada	
<b>KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-PENGETAHUAN LEVEL 6 SARJANA</b>		
P1	Mampu menguasai konsep-konsep dasar teori perilaku untuk menggambarkan dan menganalisis perilaku partisipasi politik individu	
<b>CP-MK</b>		
M1	Mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar psikologi perilaku.	
M2	Mahasiswa mampu memahami bagaimana kondisi sosial dan lingkungan dapat memengaruhi perilaku partisipasi politik.	

	M3	Mahasiswa mampu memanfaatkan konsep-konsep yang ada di sosiologi, psikologi dan <i>social network theory</i> untuk menjelaskan perilaku partisipasi politik pada individu dan masyarakat.
	M4	Mahasiswa mampu menganalisis fenomena perilaku partisipasi politik yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan konsep-konsep yang ada di psikologi sosial.
<b>Diskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini berupaya untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang partisipasi politik, secara khusus dalam perilaku memilih, sehingga mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana dinamika partisipasi politik terjadi di sekelilingnya dan menganalisis mengapa perilaku dan fenomena tersebut terjadi.	
<b>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Political participation in today's world</li> <li>2. Collective action and political participation</li> <li>3. Social Cognition; How We Think About the Social World</li> <li>4. Social Perception; Perceiving and Understanding Others</li> <li>5. Attitudes; Evaluating and Responding to the Social World</li> <li>6. Social network theory (1)</li> <li>7. Social network theory (2)</li> <li>8. Social identity theory</li> <li>9. Social Influence; Changing Others' Behavior</li> <li>10. Groups and Individuals; The Consequences of Belonging</li> <li>11. Mass communication and politics</li> <li>12. Methods in political participation research</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<b>Utama</b>	
	Long, S. L. (1981). The handbook of political behavior, Vol.4. Springer New York, NY. DOI: <a href="https://doi.org/10.1007/978-1-4684-3878-9">https://doi.org/10.1007/978-1-4684-3878-9</a>	

	Baron,R.A., Branscombe, N.R, (2012). Social Psychology (13th edition). USA : Pearson	
	<b>Pendukung :</b>	
	Setiawan, T., Suhartomo, A. (2021). Employing Graph Theory in Determining Social Network Vulnerability. Novateur Publication.	
<b>Media Pembelajaran</b>	<b>Perangkat lunak</b>	<b>Perangkat keras</b>
	<i>Learning management system (LMS), Zoom, Whatsapp</i>	Komputer
<b>Team Teaching</b>	Drs. Muhammad AS Hikam, MA, Ph.D; Dr. Tery Setiawan, M.Si; Antonius Suhartomo, Ph.D.	
<b>Mata Kuliah syarat</b>	-	

Minggu ke	Sub-CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan taksonomi Bloom	Bahan kajian (materi pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami konsep partisipasi politik beserta dimensi-dimensinya	Political participation and its dimensions	<b>Bentuk:</b> (kuliah) <b>Metode:</b> pembelajaran (diskusi, ceramah,	<b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah & diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit)	Ringkasan/ makalah	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk</b>	Ketepatan menjelaskan tentang perilaku partisipasi politik.	2.5%

			presentasi )	<b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)		nontest : Ringkasan 1; Presentasi		
2	Mahasiswa mampu memahami definisi aksi kolektif, yang mana partisipasi politik berada di dalamnya, dan memahami beberapa teori aksi kolektif	Collective action and political participation	<b>Bentuk:</b> (kuliah) <b>Metode:</b> pembelajaran (diskusi, ceramah, presentasi )	<b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah & diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit) <b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)	Ringkasan/makalah	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk</b> nontest : Ringkasan 2; Presentasi	Ketepatan menjelaskan tentang proses aksi kolektif terjadi.	2.5%
3	Mahasiswa mampu memahami seperti apa proses berpikir manusia dalam memandang dunia sosial.	Social Cognition; How We Think About the Social World	<b>Bentuk:</b> (kuliah) <b>Metode:</b> pembelajaran (diskusi, ceramah, presentasi )	<b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah & diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit)	Ringkasan/makalah	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk</b>	Ketepatan menjelaskan tentang proses berpikir manusia dalam memandang dunia sosial.	2.5%

				<b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)		nontest : Ringkasan 3; Presentasi		
4	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan kembali seperti apa proses manusia mempersepsikan dan memahami orang lain</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan kembali seperti apa proses manusia mempersepsikan dan memahami orang lain dan aplikasinya dalam keseharian</p>	<p>Social Perception; Perceiving and Understanding Others</p>	<p><b>Bentuk:</b> (kuliah) <b>Metode:</b> pembelajaran (diskusi, ceramah, presentasi )</p>	<p><b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah &amp; diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit)</p> <p><b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)</p>	Ringkasan/makalah	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk:</b> Tes : Kuis 1</p> <p>nontest : Tulisan makalah; Presentasi</p>	<p>Ketepatan menjelaskan kembali tentang proses mempersepsikan dan memahami orang lain dan aplikasinya dalam keseharian.</p>	5%

5	Mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep <i>social cognition</i> dan <i>social perception</i> dalam menganalisa kasus	<i>Case Analysis</i>	<b>Bentuk:</b> (kuliah)  <b>Metode:</b> Case study (diskusi, ceramah, presentasi )	<b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah & diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit)  <b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)	Mahasiswa dapat menjawab, menjelaskan, dan berdiskusi materi pertemuan 3	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan Penguasaan  <b>Bentuk:</b> nontest : Tugas kelompok 1; Presentasi	Ketepatan dalam menerapkan konsep-konsep <i>social cognition</i> dan <i>social perception</i> dalam menganalisa kasus.	10%
6	Mahasiswa mampu menguraikan kembali tentang perkembangan sikap manusia dan pengaruh sikap tersebut terhadap perilaku.  Mahasiswa mampu	Attitudes; Evaluating and Responding to the Social World  The Causes, Effects, and Cures of	<b>Bentuk:</b> (kuliah)  <b>Metode:</b> pembelajaran (diskusi, ceramah, presentasi )	<b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah & diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit)  <b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60	Ringkasan/makalah	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk:</b> nontest : Ringkasan 4; Presentasi	Ketepatan menguraikan kembali tentang proses pembentukansikap manusia dan pengaruhnya terhadap perilaku.	5%

	menjelaskan kembali apa yang menjadi penyebab stereotype, prejudice, dan diskriminasi, serta efeknya terhadap kondisi psikologis dan strategi penanganannya.	Stereotyping, Prejudice, and Discrimination		menit) <b>BM= Belajar Mandiri</b> Belajar Mandiri ( 1 SKS x 60 menit)			Ketepatan menjelaskan kembali apa yang menjadi penyebab stereotype, prejudice, dan diskriminasi, serta efeknya terhadap kondisi psikologis dan strategi penanganannya	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan kembali : 1. Partisipasi politik dan collective action 2. Social Cognition; How We Think About the Social World 3. Social Perception;	UTS	<b>Bentuk :</b> Tes tertulis	<b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 4 SKS x 60 menit)	Menjawab soal tertulis	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk:</b> <b>Tes : UTS</b>	Ketepatan menguraikan kembali : 1. Partisipasi politik dan collective action 2. Social Cognition; How We Think About the Social World 3. Social Perception;	15%

	<p>Perceiving and Understanding Others</p> <p>4. Attitudes; Evaluating and Responding to the Social World</p> <p>5. The Causes, Effects, and Cures of Stereotyping, Prejudice, and Discrimination</p> <p>6. Social network theory</p>						<p>Perceiving and Understanding Others</p> <p>4. Attitudes; Evaluating and Responding to the Social World</p> <p>5. The Causes, Effects, and Cures of Stereotyping, Prejudice, and Discrimination</p> <p>6. Konsep dasar social network theory</p>	
8	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan apa social network theory dan elemen-elemen inti di dalamnya</p>	<p>Social network theory dan elemen-elemen yang berkaitan dengan partisipasi</p>	<p><b>Bentuk:</b> (kuliah)</p> <p><b>Metode:</b> pembelajaran (diskusi, ceramah, presentasi )</p>	<p><b>TM= Tatap Muka</b></p> <p>Kuliah &amp; diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit)</p>	<p>Ringkasan/makalah</p>	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk:</b></p> <p><b>nontest :</b></p>	<p>Ketepatan menjelaskan kembali tentang dinamika jaringan sosial yang terjadi pada individu sehingga memiliki hubungan dengan</p>	

		politik		<b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)		Ringkasan 5; Presentasi	pengambilan keputusan, termasuk berpartisipasi secara politik  Ketepatan menjelaskan tentang pengaruh sosial terhadap perubahan perilaku	2.5%
9	Mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep tentang attitude, stereotype, prejudice, discrimination dan social network theory dalam menganalisa kasus.	<i>Case Analysis</i>	<b>Bentuk:</b> (kuliah)  <b>Metode:</b> case study (diskusi, ceramah, presentasi )	<b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah & diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit)  <b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)	Mahasiswa dapat menjawab, menjelaskan, dan berdiskusi materi pertemuan 6	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk:</b> nontest : Tugas kelompok 2 Presentasi	Ketepatan menerapkan konsep-konsep tentang attitude, stereotype, prejudice, discrimination dan social network theory dalam menganalisa kasus.	5%

10	Mahasiswa mampu menjelaskan beragam jenis network sosial dan aplikasinya dalam partisipasi politik	Social network theory dan aplikasinya dalam partisipasi politik	<b>Bentuk:</b> (kuliah) <b>Metode:</b> pembelajaran (diskusi, ceramah, presentasi )	<b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah & diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit) <b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)	Ringkasan/makalah	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk: nontest</b> : Ringkasan 6; Presentasi	Ketepatan menjelaskan kembali tentang dinamika jaringan sosial yang terjadi pada individu sehingga memiliki hubungan dengan pengambilan keputusan, termasuk berpartisipasi secara politik  Ketepatan menjelaskan tentang pengaruh sosial terhadap perubahan perilaku	2.5%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan teori identitas sosial dan aplikasinya dalam menjelaskan fenomena	Identitas sosial dan proses pembentukan identitas	<b>Bentuk:</b> (kuliah) <b>Metode:</b> <b>pembelajaran</b> (diskusi,	<b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 2 SKS x 60 menit)	Ringkasan/Makalah	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk:</b>	Ketepatan menjelaskan pembentukan identitas sosial dan bagaimana pengaruhnya dalam	

	partisipasi politik		ceramah, presentasi )			<b>nontest :</b> Ringkasan 7; Presentasi	perilaku partisipasi politik	2.5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengaruh sosial dan implikasinya terhadap partisipasi politik individu	Social influence	<b>Bentuk:</b> (kuliah)  <b>Metode:</b> (diskusi, ceramah, presentasi )	<b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah & diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit)  <b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)	Ringkasan/makalah	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk:</b> Ringkasan 8	Ketepatan menjelaskan kembali tentang pengaruh sosial dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan pada individu	2.5%

13	Mahasiswa bisa menguraikan kembali mengapa manusia berkelompok dan seperti apa pengaruh kehadiran orang lain terhadap kinerja individu.	Groups and Individuals; The Consequences of Belonging	<b>Bentuk:</b> (kuliah)  <b>Metode:</b> pembelajaran (diskusi, ceramah, presentasi )	<b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah & diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit)  <b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)	Ringkasan/makalah	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk:</b> <b>nontest :</b> Ringkasan 9; Presentasi	Ketepatan menguraikan kembali tentang mengapa manusia berkelompok dan seperti apa pengaruh kehadiran orang lain terhadap kinerja individu.	2.5%
14	Mahasiswa bisa memahami bagaimana komunikasi massa terjadi dan penggunaannya dalam konteks politik elektoral	Mass communication and politics	<b>Bentuk:</b> (kuliah)  <b>Metode:</b> pembelajaran (diskusi, ceramah, presentasi )	<b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah & diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit)  <b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)	Ringkasan/makalah	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk:</b> <b>nontest :</b> Ringkasan 10; Presentasi	Ketepatan menguraikan kembali penggunaan komunikasi massa dalam politik elektoral	2.5%

15	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep metodologi penelitian dalam penelitian partisipasi politik	Methods in political participation research	<b>Bentuk:</b> (kuliah)  <b>Metode:</b> pembelajaran (diskusi, ceramah, presentasi )	<b>TM= Tatap Muka</b> Kuliah & diskusi, (TM= 1 (sks) X 50 menit)  <b>BT= Belajar Terstruktur</b> (BT= 1 SKS x 60 menit)	Mahasiswa membaca beberapa jurnal penelitian tentang partisipasi politik	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk:</b> <b>nontest :</b> Ringkasan 11; Presentasi	Ketepatan dalam menjelaskan rambu-rambu penelitian (metodologi)	2.5%
16	Mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep yang telah diajarkan untuk membuat penelitian mini tentang partisipasi politik	Final project: riset partisipasi politik	<b>Bentuk:</b> (kerja kelompok)  <b>Metode:</b> pembelajaran (diskusi)	<b>BM= Belajar Mandiri</b> Belajar Mandiri ( 2 SKS x 50 menit)	Mahasiswa membaca dan menuangkan ide riset ke dalam proposal penelitian	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk:</b> <b>nontest :</b> proposal penelitian	Ketepatan dalam menggunakan konsep-konsep yang telah diajarkan di dalam proposal penelitiannya	15%

## **Bab VI**

### **Demokrasi dan Partisipasi Politik**

Dalam bab terakhir ini, kami akan membahas mengenai kaitan langsung antara demokrasi dan partisipasi politik sebagai penekanan betapa pentingnya topik partisipasi politik di dalam kehidupan berdemokrasi. Sebelum membahas mengenai kaitan tersebut, kami rangkum terlebih dahulu hasil penelitian kami sebagai dasar diskusi tentang kaitan antara demokrasi dan partisipasi politik.

#### *Rangkuman hasil penelitian berkaitan dengan perkembangan demokrasi dan partisipasi politik*

Berdasarkan hasil tinjauan *scoping review*, didapatkan temuan adanya peningkatan dalam partisipasi politik masyarakat Indonesia secara umum (Fonataba, 2016), khususnya dalam partisipasi tingkat lokal (Djuyandi et al., 2021). Partisipasi politik ditunjukkan berkaitan erat dengan kinerja pemerintah. Menurut literatur yang ada, pendidikan mengenai politik perlu ditingkatkan agar masyarakat paham akan akses untuk aspirasi politiknya. Selain itu, DPT juga perlu diperhatikan karena hal ini dapat mengurangi tingkat antusiasme masyarakat (Kelana, 2015). Berdasarkan tinjauan ini, kami melihat bahwa masih diperlukan penelitian mengenai dimensi partisipasi politik selain perilaku elektoral. Hal ini penting guna memperkuat struktur masyarakat dan berjalannya demokrasi (Campbell, 2013).

Hal menarik lainnya adalah dorongan untuk semakin beradaptasi dalam perkembangan teknologi oleh situasi pandemi Covid-19. Kampanye digital menjadi keharusan untuk pilihan efektif dalam melakukan sosialisasi tentang partai, misi & visi, dan kandidat yang diusung (Dari and Humau 2020). Hal ini juga ternyata telah diakomodir oleh KPU agar setiap kandidat dan partai memiliki kampanye digital. Oleh karena itu, terdapat peluang untuk penelitian mengenai efektivitas konten dalam digital kampanye sekaligus bagaimana jaringan individu secara tatap muka dapat dipindahkan ke jaringan sosial *online*-nya.

Selanjutnya, studi Aspinall (2014) menunjukkan bahwa perhelatan pemilihan di Indonesia ditentukan oleh keberadaan perantara. Meski hal ini terdengar hanya sebatas penjual dan pembeli, studi tersebut menyebutkan bahwa hubungan personal juga menjadi salah satu faktor perantara menjual dan memenangkan seorang kandidat. Selain itu, penelitian-penelitian yang ada di dalam tinjauan ini menunjukkan bahwa faktor orang memilih seorang kandidat dapat berdasarkan atas identitas gender dan agamanya (contoh: Yolanda dan Halim 2020; Rhoads 2012).

Berlanjut ke penelitian survei kami, hasilnya menunjukkan bahwa memang identitas keagamaan masih berkaitan erat dengan niat perilaku individu untuk terlibat dalam pemilu 2024. Secara spesifik, orang-orang yang mempersepsikan kelompok agamanya secara positif dan secara bersamaan mempersepsikan kelompok di luar agamanya secara negatif cenderung untuk tidak memilih pada pemilu Indonesia 2024.

Ditambahkan, kami juga menunjukkan bahwa partisipasi politik *offline* memainkan peran penting dalam meningkatkan niat individu untuk memilih, bahkan selama pandemi Covid-19. Temuan ini menarik karena meskipun fenomena partisipasi politik *online* sudah cukup marak di kalangan masyarakat Indonesia, seperti membentuk grup *facebook* sebagai pendukung parpol dan media berdiskusi, ternyata kegiatan partisipasi secara *offline* masih tetap menjadi prediktor utama untuk menentukan apakah orang akan terlibat dalam pemilu 2024 atau tidak. Hal ini sejalan dengan trend mobilisasi massa dalam setiap kampanye yang masih secara konsisten dilakukan oleh setiap parpol.

Berikutnya, kami akan gunakan kedua hasil penelitian ini sebagai bukti empiris di dalam pembahasan kaitan antara demokrasi dan partisipasi politik di bawah ini:

#### *Demokrasi dan partisipasi politik*

Perkembangan perpolitikan Indonesia pasca-reformasi menunjukkan dinamika yang ditengarai kian mengarah kepada pemerosotan wacana dan praksis demokrasi. Memang benar bahwa jika dilihat secara formal, maka praktik demokrasi kita cukup menggembarakan dan, sampai tingkat tertentu, membanggakan. Namun jika kita mau melihat dan mencermati secara mendalam, maka investasi untuk memperkuat demokrasi cenderung mengkhawatirkan. Formalisme yang ada mengakibatkan sebuah praktik demokrasi yang sarat dengan transaksionalisme, praktik korupsi di kalangan politisi, penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) politisi baik di parlemen maupun di parpol, dan kian berkuasanya para *oligarch*.

Pada tataran non-elektoral, pentas politik selama beberapa tahun ini dijangkiti oleh virus berbahaya seperti politik identitas dengan maraknya penggunaan SARA dalam wacana dan praksis; maraknya penyebaran *hoax* dalam komunikasi politik, dan kian menipisnya kesantunan publik di dalam wacana dan praksis politik. Menguatnya mobilisasi massa untuk menjustifikasi kuatnya dukungan politik, melahirkan kekhawatiran tentang bahaya mobokrasi sebagai bentuk manipulatif dari demokrasi. Fakta-fakta terkait dengan dinamika yang menghasilkan kemunduran demokrasi sangat berlimpah khususnya saat kita sedang menggelar "pesta demokrasi".

Di negeri kita saat ini tampak jelas bahwa terjadi kemerosotan dalam landasan budaya bagi pengembangan demokrasi konstitusional. Budaya menindas (eg dalam relasi mayoritas-minoritas), tebang pilih (e.g dalam penegakkan hukum), feodalisme (e.g parpol, birokrasi pemerintahan), pesimisme dan sinisme (e.g dalam persepsi terhadap demokrasi), *hoax* (dalam komunikasi publik, media, medsos), dan ketakutan (e.g dalam propaganda ideologi anti Pancasila) mesti diubah total. Jika tidak, maka fondasi demokrasi kita akan dilemahkan dan rentan terhadap intrusi dan ancaman baik yang bersumber dari dalam batang tubuh bangsa maupun dari luar.

Budaya-budaya korosif di atas memungkinkan kembalinya paham otoriterisme dan kekuasaan yang dibangun di atasnya. Kendati otoriterisme sudah kita tumbangkan lebih dari dua dasawarsa lalu, bukan hal yang mustahil untuk berusaha kembali lagi, seperti yang kita saksikan di negara-negara Amerika Latin (Brazil, dan Venezuela), Asia (Thailand dan Filipina), Afrika (Mesir, Sudan), dan sebagainya. Kegagalan mereka dalam mempertahankan dan melanjutkan perjuangan, menghasilkan sebuah fenomena "*dedemocratization*" baik secara perlahan maupun cepat.

Berdasarkan hal tersebut, demokrasi sebagai sebuah sistem politik memerlukan pengawalan dan penjagaan agar tetap berkelanjutan. Untuk keperluan tersebut, pendidikan terkait dengan demokrasi mulai dari filsafat, prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai etik, sampai pada prosedur formal dan teknis, harus terus menerus dilakukan terhadap baik penyelenggara negara maupun warga negara. Menjalankan sistem demokrasi yang efektif dan berkesinambungan tidak mungkin tanpa pemahaman yang tepat apalagi kalau hanya sebagai formalitas belaka. Menganggap sistem demokrasi akan berjalan secara otomatis atau hanya terserah kepada para politisi adalah kesalahan mendasar dan fatal.

Salah satu pemahaman tentang demokrasi yang paling keliru adalah menganggap sistem tersebut tidak memerlukan kedisiplinan yang tinggi. Demokrasi dianggap sebagai pengejawantahan ide-ide dasar kebebasan (*freedom*) dan hak-hak (*rights*) manusia, sehingga dikesankan secara keliru bahwa pendukung demokrasi boleh melakukan apa saja atas nama ide-ide tersebut. Kendati sampai pada titik tertentu anggapan tersebut ada benarnya, tetapi jika dipahami secara hakiki, ia justru berpotensi merusak praktik demokrasi. Sebab demokrasi juga mensyaratkan suatu etos kedisiplinan yang kuat, baik pada tataran individual maupun kolektif, agar ia bisa bekerja dan berlangsung dengan efektif dan produktif serta bermanfaat bagi semua.

Itulah sebabnya jika ada orang yang menolak berbagai bentuk kedisiplinan, seperti mematuhi aturan main (*rule of law*) yang disepakati, konsisten dengan komitmen nilai-nilai

utama (*virtues*), dan bersedia untuk mengorbankan kepentingan pribadi bagi kepentingan bangsa, maka orang tersebut masih belum serius atau jujur dalam memahami dan melaksanakan sistem demokrasi. Apalagi jika ada orang atau kelompok yang mengatasnamakan demokrasi tetapi pada saat yang sama menginjak-injak prinsip-prinsipnya. Demokrasi, karena sifatnya yang terbuka, bisa juga dimanipulasi untuk mengantarkan kekuasaan yang diktatorial dan tiranikal. Itu semua terjadi karena para pelaksana demokrasi melupakan atau meninggalkan salah satu syarat utamanya, yakni kedisiplinan.

Selain kedisiplinan, demokrasi biasanya dikaitkan dengan kebebasan, lantas diartikan kebebasan tanpa batas. Padahal, kebebasan tanpa batas justru mengingkari kata itu sendiri. Kebebasan hanya benar-benar terwujud jika di dalamnya disertai dengan kesadaran mengenai adanya batas yang tertanam dalam prinsip kebebasan itu. Kesadaran tentang dialektika antara kebebasan dan batas itulah yang akan membuat wacana dan praksis kebebasan (termasuk berdemokrasi) menjadi bermakna dan produktif. Kesadaran itulah yang mendorong terwujudnya demokrasi dan nomokrasi pada saat yang sama. Kesadaran itu pula yang akan menghindarkan kita dari perilaku manipulatif dan culas seperti mengatasnamakan demokrasi hanya ketika kita menuntut hak tetapi melupakan kewajiban.

Kebebasan yang disertai dengan kesadaran akan batasnya adalah kekuatan positif dan produktif. Sebaliknya, kebebasan yang menafikan kesadaran akan batas adalah justru pencederaan dan distorsi terhadap, dan karenanya melemahkan, kebebasan itu sendiri. Demokrasi hanya akan terwujud secara efektif dan produktif jika para pelakunya mampu memadukan keduanya secara dialektis dan dinamis.

Salah satu pendidikan demokrasi yang utama adalah menanamkan prinsip kebijaksanaan bagi warga negara sebagai pemilik hak pilih. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan hak yang sangat mendasar tersebut. Jika warga negara tidak bijak maka hak pilih mereka dengan mudah dibeli oleh pihak-pihak yang hanya menginginkan kemenangan dan merebut kekuasaan dengan cara mudah. Jika warga negara tidak bijak, mereka akan mudah terintimidasi oleh kekuatan-kekuatan yang punya pengaruh dan daya paksa. Jika warga negara tidak bijak, maka akan mudah dikendalikan atau dimanipulasi oleh gagasan dan ideologi yang malah akan menghancurkan sistem demokrasi. Pendidikan yang membebaskan mesti mampu menjawab tantangan ini, khususnya di Indonesia yang sedang memperjuangkan sistem demokrasi.

Keputusan untuk berpartisipasi secara politik, baik itu terlibat dalam gotong royong rutin di lingkungan rumah atau menggunakan hak pilih, sejatinya membutuhkan kedisiplinan. Tidak hanya hal ini menjadi bagian dari pentas pemilihan umum setiap lima tahunnya, namun

secara mendasar hal ini adalah elemen esensial dalam kehidupan berdemokrasi (van Deth, 2016). Untuk itu, partisipasi politik tentunya topik penting yang juga perlu diajarkan sebagai mata kuliah, atau setidaknya bagian dari mata kuliah, agar masyarakat Indonesia semakin memahami pentingnya keterlibatan sosial setiap warga dalam sebuah masyarakat dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan dinamika politik, sehingga praktik politik perantara dan praktik uang dalam pemilihan elektoral dapat semakin dikurangi.

Demokrasi bukanlah sebuah sistem yang sempurna dan berjalan dengan sendirinya. Ia perlu dipelihara, dijaga, diawasi, dan diperkuat. Pendidikan untuk demokrasi dengan demikian adalah salah satu kuncinya. Kehilangan kunci tersebut berarti juga kehilangan sistem demokrasi itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Alam, M. S., Nasir, M., & Elwan, L. O. M. (2019). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Netra Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum 2019*. 1–12.
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1017/S0922156508005621>
- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- Barker, D. C. (1998). The Talk Radio Community: Nontraditional Social Networks and Political Participation Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/42863788> The Talk Radio Community: Nontraditional Social Networks and Political Participation \*. *Social Science Quarterly*, 79(2), 261–272.
- Borgatti, S. P., & Lopez-Kidwell, V. (2014). Network Theory. In *The SAGE Handbook of Social Network Analysis* (pp. 40–54). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446294413.n4>
- Campbell, D. E. (2013). Social networks and political participation. *Annual Review of Political Science*, 16, 33–48. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-033011-201728>
- Conceição, P. (2019). *Human development and the SDGs* (pp. 24–26). The World Bank.
- Dari, S. D. A., & Humau, B. R. F. (2020). Dampak Covid-19 dan Strategi Pemenangan Partai Politik dalam Persiapan Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di NTT. *Jurnal Politicon*, 09.
- Darwin, R. L., & Haryanto. (2021). Women candidates and Islamic personalization in social media campaigns for local parliament elections in Indonesia. *South East Asia Research*, 29(1), 72–91. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2021.1878928>
- Djuyandi, Y., Darmawan, W. B., & Jumroh. (2021). Democracy and local political participation in Sumedang, Indonesia. *Journal of Public Affairs*, July. <https://doi.org/10.1002/pa.2726>
- Fonataba, F. F. (2016). Partisipasi Masyarakat Papua dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (Suatu studi di kota Jayapura Selatan Provinsi Papua). *Politico: Journal Ilmu Politik*, 3(1), 1–16.
- Gil de Zúñiga, H. (2012). Social Media Use for News and Individuals' Social Capital, Civic Engagement and Political Participation. *Journal of Computer-Mediated Communication*,

- 17(3), 319–336. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x>
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's year of democratic setbacks: towards a new phase of deepening illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>
- Huis, M. A., Hansen, N., Otten, S., & Lensink, R. (2017). A three-dimensional model of women's empowerment: Implications in the field of microfinance and future directions. *Frontiers in Psychology*, 8(SEP), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01678>
- Hutabarat, D. (2021). Revisi UU Pemilu Dicabut dari Prolegnas 2021, Pilkada 2022 dan 2023 Ditiadakan. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/news/read/4502637/revisi-uu-pemilu-dicabut-dari-prolegnas-2021-pilkada-2022-dan-2023-ditiadakan>
- Imran, M., Rakhman, B., & Herianto, D. (2021). Partisipasi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020. *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar*, 1(1), 38–45.
- Jandevi, U. (2019). New media for increasing political participation in Indonesia. *International Journal of Communication and Society*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v1i1.19>
- Karundeng, M. (2015). Perilaku Politik Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Manado Kecamatan Wenang. *Politico: Journal Ilmu Politik*, 1(7), 1–21.
- Kelana, E. P. (2015). Partisipasi dalam Pemilu “Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih Di Tps Dalam Pemilu Di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.” *Lentera*, 15(16), 13–19.
- Knudsen, M. S., & Christensen, H. S. (2021). Future Orientation and Political Participation: The Moderating Role of Political Trust. *Frontiers in Political Science*, 3. <https://doi.org/10.3389/fpos.2021.791467>
- Maimun, A. (2021). Perilaku Politik Masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ( Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya , Kabupaten Aceh Besar ). *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 2(1), 1–16.
- Marin, A., & Wellman, B. (2015). The SAGE Handbook of Social Network Analysis. In J. Scott & P. J. Carrington (Eds.), *The SAGE Handbook of Social Network Analysis* (pp. 11–25). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446294413>
- McClurg, S. D. (2003). Social Networks and Political Participation: The Role of Social Interaction in Explaining Political Participation. *Political Research Quarterly*, 56(4), 449. <https://doi.org/10.2307/3219806>
- Mulia, M. (2011). Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi. In E. P.

- Taher (Ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 tahun Djohan Effendi*. Yayasan Abad Demokrasi.
- O'Brien, K., Wilkins, A., Zack, E., & Solomon, P. (2010). Scoping the field: Identifying key research priorities in HIV and rehabilitation. *AIDS Behav*, *14*, 448–458.
- Oladipo, S. . (2010). Psychological empowerment and development. *Edo Journal of Counselling*, *2*(1), 119–126. <https://doi.org/10.4314/ejc.v2i1.52661>
- Pakpahan, A. C., & Chandra, A. I. (2009). Penyerapan Publik terhadap Pesan-Pesan dalam Komunikasi Politik Para Kandidat Presiden & Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2009 Studi Kasus Kota Jakarta Pusat dan Kabupaten Garut Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. *Research Reports in the Humanities and Social Sciences*, *2*.
- Parinduri, R. A. (2019). Does education increase political participation? Evidence from Indonesia. *Education Economics*, *27*(6), 645–657. <https://doi.org/10.1080/09645292.2019.1668914>
- Pontoh, A. H. (2014). Perilaku Memilih Masyarakat Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 (Suatu Studi di Kecamatan Bolangitang Barat). *Politico: Journal Ilmu Politik*, *1*(5), 1–17.
- Pratama, H. N., & Sadewo, F. S. (2015). Harrys Nanda Pratama FX Sri Sadewo Abstrak. *Social Networking System Sebagai Public Sphere Politik Era Postdemokrasi Kampanye Pilpres 2014*, *03*, 1–8.
- Prihatini, E. S. (2018). Indonesian young voters: Political knowledge and electing women into parliament. *Women's Studies International Forum*, *70*(July 2018), 46–52. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.07.015>
- Rhoads, E. (2012). Women's Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *31*(2), 35–56. <https://doi.org/10.1177/186810341203100202>
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, *18*(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Setiawan, T., De Jong, E. B. P., Scheepers, P. L. H., & Sterkens, C. J. A. (2020). The relation between religiosity dimensions and support for interreligious conflict in Indonesia. *Archive for the Psychology of Religion*, *42*(2), 244–261. <https://doi.org/10.1177/0084672419878824>
- Setiawan, T., Riasnugrahani, M., & Rahmani, K. (2021). *Teknik Pengumpulan Data dalam*

*Ilmu Psikologi* (V. Handayani (ed.); Issue June 2022). Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Maranatha.

- Setiawan, T., & Suhartomo, A. (2019). The Relation between Internet Use and Societal Development in Indonesia. *ICSECC 2019 - International Conference on Sustainable Engineering and Creative Computing: New Idea, New Innovation, Proceedings*, 133–137. <https://doi.org/10.1109/ICSECC.2019.8907127>
- Smith, H. J., & Pettigrew, T. F. (2015). Advances in relative deprivation theory and research. *Social Justice Research*, 28(1), 1–6. <https://doi.org/10.1007/s11211-014-0231-5>
- Song, L., Son, J., & Lin, N. (2014). The SAGE Handbook of Social Network Analysis. In J. Scott & P. Carrington (Eds.), *The SAGE Handbook of Social Network Analysis* (pp. 116–128). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446294413>
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., ... Straus, S. E. (2018). Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist SECTION. *Ann Intern Med*, 169(7), 11–12. <https://doi.org/10.7326/M18-0850.2>
- van Deth, J. W. (2016). What Is Political Participation? In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.68>
- van Stekelenburg, J., & Klandermans, B. (2013). The social psychology of protest. *Current Sociology Review*, 61(5–6), 1–13. <https://doi.org/10.1177/0011392113479314>
- Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28–49. <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>
- Weinschenk, A. C., Dawes, C. T., Oskarsson, S., Klemmensen, R., & Nørgaard, A. S. (2021). The relationship between political attitudes and political participation: Evidence from monozygotic twins in the United States, Sweden, Germany, and Denmark. *Electoral Studies*, 69. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102269>
- Westaby, J. D., Pfaff, D. L., & Redding, N. (2014). Psychology and social networks: A dynamic network theory perspective. *American Psychologist*, 69(3), 269–284. <https://doi.org/10.1037/a0036106>
- Yolanda, H. P., & Halim, U. (2020). Partisipasi Politik Online Generasi Z Pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 10(2), 30–39.

<https://doi.org/10.35814/coverage.v10i2.1381>

Perilaku partisipasi politik sebuah masyarakat juga berkaitan dengan perkembangan sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh, kehadiran media sosial, seperti Facebook, berperan dalam meningkatkan partisipasi politik. Oleh karena itu, muncul dan berkembangnya pandemi Covid-19 menjadi penting untuk dilibatkan dalam diskusi partisipasi politik saat ini. Pandemi Covid-19 tidak dapat disangkal telah membuat perbedaan pendapat dalam masyarakat. Berbagai perdebatan mengenai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan di masyarakat (PPKM) hingga pemberian vaksinasi pada umumnya akan berujung pada dua pandangan; setuju atau tidak setuju (Hutabarat 2021). Di Indonesia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah diputuskan untuk ditiadakan di tahun 2022 dan 2023, sehingga kebijakan publik strategis seperti PPKM dan bantuan tunai dapat memengaruhi perilaku partisipasi masyarakat dalam politik. Itu sebabnya, penelitian mengenai partisipasi politik di masa pandemi Covid-19 dianggap sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Hal ini diharapkan dapat mencerminkan partisipasi politik dalam pemilihan serentak tahun 2024.

Buku ini mendiskusikan partisipasi politik menggunakan pendekatan multidisipliner. Pendekatan tersebut adalah social network analysis (SNA) yang dapat memotret kompleksitas jaringan sosial seseorang dan menganalisis dampaknya terhadap suatu perilaku, dan pendekatan identitas sosial yang fokus pada kebermaknaan sebuah kelompok sosial individu yang berpengaruh pada perilaku sosialnya.

**Penerbit**  
**Fakultas Psikologi**  
**Universitas Kristen Maranatha**

**Muhammad AS Hikam**  
**Tery Setiawan**  
**Antonius Suhartomo**  
**Sefty Meliana Tamba**  
**Elkana William Hasibuan**  
**Azzizah Mulia Kusumaningrini Kartodirdjo**  
**Syafira Fauzi**  
**Thariq Auliya Arrazaq**